

BAB III

KONTRIBUSI PROGRAM KERJA

YAYASAN TIONGHOA DI SINGKAWANG

Kesadaran berorganisasi masyarakat Tionghoa termasuk perantau Singkawang, sudah tinggi bahkan terlihat sampai sekarang misalnya dengan adanya beberapa organisasi seperti Perkumpulan Masyarakat Singkawang dan sekitarnya (Permasis) dan Perhimpunan Tionghoa Kalbar (PTK) Indonesia yang didirikan pada 15 November 2018 di Jakarta. Tahun 2019 PTK Indonesia mengadakan perayaan Imlek di Kemayoran Jakarta yang dihadiri sekitar 20.000 orang. (Adam, 2020)

Yayasan Tionghoa memiliki berbagai macam program-program kerja di bidang-bidang yang saat ini ditempatkan dan dilaksanakan oleh yayasan, yaitu: program kerja di bidang keagamaan, sosial dan pendidikan.

A. Bidang Sosial

Organisasi Tionghoa berupa yayasan-yayasan sosial sebenarnya banyak membantu warga etnik Tionghoa. Misalnya, yayasan pemadam kebakaran (yang dikenal dengan Badan Pemadam Kebakaran Swasta/BPKS), yayasan perkumpulan marga, dan sebagainya. Yayasan-yayasan ini secara umum bersifat sosial dan membantu warga etnik Tionghoa dalam banyak hal, mulai dari penanggulangan bencana kebakaran, pengurus dokumen-dokumen kependudukan, hingga menjadi koordinator dari berbagai kegiatan amal. Sebagai contoh, pada saat terjadi kebakaran di Singkawang, selain memadamkan api, yayasan pemadam yang didirikan oleh warga etnik Tionghoa pun membantu warga dengan menggalang dana bantuan pasca kebakaran.

Pemadam kebakaran atau disingkat DAMKAR merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah yang memiliki tanggung jawab membantu masyarakat dalam penanganan kebakaran. Selain melakukan pemadaman api, petugas damkar juga dilatih untuk melakukan evaluasi seperti penyelamatan korban kecelakaan, bencana alam dan evakuasi gawat darurat lainnya.

Badan Pemadam Kebakaran di Singkawang merupakan cabang atau perwakilan dari pemadam kebakaran yang ada di Pontianak. Walaupun pada awalnya anggota badan pemadaman kebakaran ini hanya etnik Tionghoa, belakangan mereka telah membuka keanggotaan dari etnik Melayu dan Dayak. Kegiatan pemadam kebakaran ini memeperkuat solidaritas di antara sesama etnik Tionghoa (yang kaya membantu dengan dana, yang tidak kaya membantu dengan tenaga), sekaligus menunjukkan eksistensi mereka dalam masyarakat Singkawang, Pontianak, dan kota lainnya di Kalimantan Barat. Kegiatannya pun telah meluas tidak sekedar memadamkan kebakaran, tetapi uga membantu menyalurkan air bersih untuk penduduk di musim kemarau.

Badan Pemadam Api Siantan (BPAS) dibentuk di Pontianak tahun 1949 dan merupakan badan pemadam kebakaran swasta yang pertama di Indonesia. Tahun 1976 berdiri yayasan pemadam kebakaran Panca Bhakti, disusul yayasan Budi Pekerti pada tahun 1994. Ketiganya merupakan yayasan pemadam kebakaran swasta yang bernaung dibawah yayasan Tionghoa dan bergerak tanpa pamrih di Pontianak. Yayasan ini memiliki mobil tangki sendiri dan pasukan pemadam sukarela yang siap ditugaskan bila ada teradi kebakaran. Pemerintah daerah sendiri memilikij dinas kebakaran dengan personil terbatas. Dinas pemadam kebakaran Kota Pontianak hanya memiliki 25 orang personil, sementara Sembilan yayasan pemadam kebakaran swasta memiliki tenaga sukarela sekitar 1.000 orang. Sejak tahun 1988, Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) telah memberikan frekuensi darurat 14.700 Mhz, sehingga bila ada kebakaran semua posko pemadam kebaka ran yang ada di Kota Pontianak segera dapat di hubungi.

Namun yayasan-yayasan ini memiliki peran yang terbatas karena kebanyakan hanya bergerak di bidang sosial dan bukan politik. Masyarakat etnik Tionghoa memang relatif enggan untuk terlibat secara aktif dalam politik. Keengganan ini, tak dapat dipungkiri, uga disebabkan oleh trauma kekerasan masa lalu. Meski tidak mengalami peristiwa kekerasan tersebut secara langsung namun beberapa masyarakat Tionghoa mengaku peristiwa tersebut tetap terasa dampaknya. Trauma mengenai kekerasan yang pernah teradi di

masa lalu tersebut diwariskan melalui “petuah orang tua” mereka untuk tidak terlibat dalam hal yang terkait dengan politik.

Dalam beberapa hal, keberadaan yayasan-yayasan sosial ini memang mengisi peran yang semestinya

1. Yayasan Bhakti Suci

Dalam bidang sosial, yayasan Bhakti Suci berkontribusi dengan lebih memfokuskan pada program kerja Pemadam Kebakaran. Yang dikenal dengan sebutan Yayasan Badan Pemadam Kebakaran Swasta Bhakti Suci Kota Singkawang yang berdiri sejak tahun 1981. Yayasan ini beranggotakan 47 orang dari yang muda sampai yang tua. BPKS Bhakti Suci ini juga memberikan KTA (kartu tanda anggota) kepada para anggota yang masih aktif di yayasan. Jika anggota tersebut sudah mengundurkan diri, atau dikeluarkan secara tidak hormat. Maka, KTA tersebut tidak akan berlaku lagi. Untuk pelatihan para anggota dilakukan rutin dua minggu sekali.

BPKS Bhakti suci menempati posko lahan milik pemerintah di Jalan Kalimantan pada tanggal 25 Juli 2023, setelah beberapa kali pindah. BPKS Bhakti suci sebelum pelantikan pada tahun 1981 melakukan kegiatan memadamkan kebakaran dengan alat yang seadanya, misalnya menggunakan ember dengan cara gotong royong, karena belum ada selang. Seiring berjalannya waktu pemerintah memfasilitasi aset seperti mobil damkar dan lain sebagainya. Pendanaan yang diperoleh BPKS Bhakti Suci di dapatkan dari para donatur pengusaha Tionghoa dan masyarakat Tionghoa disekitar pasar Singkawang.

BPKS Bhakti suci sesuai dengan Misi nya yang pertama, memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran tanpa memandang Suku, Agama dan Ras. Mereka menolong siapa saja yang memerlukan pertolongan bukan hanya untuk etnis Tionghoa saja. BPKS Bhakti Suci juga bukan hanya menolong untuk masyarakat Singkawang saja. Mereka juga menolong ke luar daerah misalnya Sambas dan Bengkayang sesuai dengan jarak yang ditempuh. Untuk sekarang BPKS Bhakti suci mempunyai 3 unit mobil

damkar. Di posko ini ada 5 orang anggota BPKS Bhakti Suci yang rolling melakukan penjagaan ketat karena musibah bisa datang kapan saja.

2. Yayasan Pantulan Terang

Dalam bidang sosial, Yayasan Pantulan Terang purnama berkontribusi lebih memfokuskan pada program kerja Pemadam Kebakaran. Nama pemadam kebakaran yang merupakan bagian dari Yayasan ini adalah Badan Pemadam Kebakaran Swasta Tua Pekong (BPKST). BPKST ini sudah berdiri sejak tahun 2004 dan hingga sekarang beranggotakan 99 orang. Anggota BPKST mempunyai tim unit reaksi cepat luar kota yang terdiri dari tim inti dan cadangan. Berhubung program kerja damkar yang darurat dan penting, anggota BPKST mengadakan shift piket untuk penjagaan yang ketat di siang hari maupun malam hari.

BPKST berada di dalam satu lingkup kelenteng Fuk Tet Chi yang merupakan bagian dari Yayasan Pantulan Terang Purnama. Untuk pendanaan sama halnya dengan BPKS Bhakti Suci, BPKST memperoleh dana dari donator-donatur atau pengusaha yang sudah berhasil. BPKST mempunyai 3 unit mobil damkar terdiri dari mobil kijang, mobil ambulance dan mobil tangki. Apabila terjadi kebakaran diluar kota, tim inti tidak mencukupi slot, diperbolehkan tim cadangan untuk menggantikan. Bagi tim cadangan, dilarang berangkat apabila tim inti sudah mencukupi anggota.

B. Bidang Keagamaan

Singkawang dahulunya dinamakan 'San Kew Jong'. Nama ini berasal dari bahasa Cina, yang berarti kota di kaki gunung dekat muara dan laut. Orang-orang Tionghoa keturunan Hakka inilah yang menyebarkan kepercayaan konfusianisme disana. Ini tergambar dari banyaknya klenteng yang tersebar dari Kota Singkawang. Karena banyaknya kelenteng itu juga maka Singkawang dapat diulukan Kota Seribu Kelenteng. Kota Singkawang dikenal dengan keindahan alam dan keragaman budaya yang khas. Cap Go Meh dirayakan diseluruh dunia bagi masyarakat yang menganut sistem kalender

imlek, dalam bentuk festival yang diramaikan dengan atraksi lampion, arak-arakan, barongsai dan naga.

Cap Go Meh di Taiwan dirayakan sebagai festival lampion, Asia Tenggara merayakannya sebagai valentine imlek (hari kasih sayang), di Penang (Malaysia) jadi tradisi gadis-gadis berkumpul dan melempar jeruk ke laut. Walaupun Cap Go Meh dirayakan seluruh dunia namun Cap Go Meh dirayakan di Singkawang dengan cara yang berbeda, memiliki ciri khas budaya tradisi karena menyerap dan berasimilasi dengan budaya lokal dan dapat dikatakan merupakan pesta masyarakat terbesar di seluruh dunia. Perayaan Cap Go Meh di Singkawang selain pawai lampion, arak-arakan barongsai dan naga, terdapat juga dominasi arak-arakan Tatung, menuju kelenteng atau vihara. Tatung dalam bahasa Hakka berarti orang yang dirasuki roh, dewa, leluhur, dan atau kekuatan supranatural. Tatung atau orang yang sudah kerasukan, memiliki kekuatan supranatural mampu melakukan pengobatan, pengusiran unsur-unsur jahat (tolak balla), dan lain-lain. Arak-arakan tatung dalam perayaan Cap Go Meh di Singkawang setelah mendapat berkat dan restu dari Kelenteng atau vihara, ditandu beralaskan pedang atau paku tajam, sambil memerkan kekebalan tubuh dengan benda-benda tajam, dan lain-lain berkeliling Kota Singkawang kemudian berkumpul untuk melakukan sembahyang bersama kepada Thian (langit, berarti uga Tuhan) di altar pusat.

Cap Go Meh di Singkawang merupakan perayaan yang bersifat turun temurun. Perayaan tersebut dimulai sejak adanya Kota Singkawang sampai sekarang. Pernyataan itu dimulai sejak tahun 1900 tahunan, ketika ada wabah penyakit di Singkawang, orang-orang Singkawang pada waktu melakukan upacara religius untuk menolak bala. Setelah mereka melakukan upacara tersebut, wabah penyakit di Singkawang berangsur-angsur berkurang dan akhirnya hilang. Sejak saat itu masyarakat di Singkawang selalu melakukan upacara mengusir roh ahat dengan upacara religius karena waktu yang berdekatan maka waktu upacara tersebut digabungkan dengan upacara Cap Go Meh oleh sebab itu, setiap perayaan Cap Go Meh Singkawang pasti diadakan upacara yang dikenal sekarang dengan sebutan upacara cuci alan. Upacara cuci

ala adalah upacara yang dilakukan dengan mengelilingi jalan-alan yang ada di Singkawang

1. Yayasan Bhakti Suci

Dalam program bidang keagamaan, Yayasan Bhakti suci mempunyai Yayasan Pemakaman yang berdiri pada tahun 1966. Yayasan Pemakaman Bhakti Suci masih beroperasi hingga sekarang walaupun letaknya berpisah dari yayasan pemadam kebakaran (BPKS Bhakti Suci). Yayasan Pemakaman Bhakti Suci berada di jalan Kepol Mahmud Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat. Yayasan Pemakaman ini merupakan bagian dari organisasi atau perkumpulan masyarakat Tionghoa. Berbeda halnya dengan yayasan pemadam kebakaran BPKS Bhakti Suci yang membuka untuk umum kepada masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota, Yayasan Pemakaman Bhakti Suci hanya dibuka untuk etnis Tionghoa saja. Untuk menjaga kekulturan budaya Tionghoa saat upacara kematian. Maka masyarakat Tionghoa hanya membuka anggota dari etnisnya saja.

Seluruh yayasan kematian bernaung di bawah payung Yayasan Bhakti Suci yang didirikan sejak tanggal 19 Maret 1966. Fungsi yayasan kematian terletak pada tanggung jawab semua yayasan itu. Misalnya, ada warga Tionghoa yang meninggal, pihak keluarga tidak usah repot dengan seluruh proses pemakaman yang sedang berduka karena fungsi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus yayasan. Tugas dan tanggung jawab pihak keluarga yang berduka cita memberitahukan kepada yayasan bahwa keluarganya sedang berduka cita atas meninggalnya anggota keluarga mereka. Setelah yayasan menerima informasi dari pihak keluarga, serta merta yayasan langsung melakukan proses pemakaman. Yayasan pemakaman itu juga berfungsi sebagai sentra pelestarian kultur Kong Hu Cu sebagai faktor perekat paling kuat bagi seluruh kelompok Tionghoa di Kalimantan Barat pada umumnya Pontianak dan Singkawang.

2. Yayasan Pantulan Terang

Dalam bidang keagamaan, Yayasan Pantulan Terang mempunyai dua vihara yakni Kelenteng Fuk Thet Chi dan Vihara Gita Triratna. Dua vihara tersebut masih berfungsi dan dijaga dengan sangat ketat. Dalam kegiatan di hari besar Tionghoa Cap Go Meh, yayasan ini hanya menggunakan Kelenteng Fuk Thet Chi. Karena vihara Gita Ratna dijaga kelestariannya dengan segi bangunan bertempo dulu tanpa diubah sedikitpun.

C. Bidang Pendidikan

Dalam kebudayaan Cina, seorang yang terpelajar memperoleh kedudukan terhormat di mata masyarakatnya. Namun, menjadi orang terpelajar bukan hal yang mudah karena ada berbagai hambatan menghadang mereka. Salah satunya adalah kondisi social-ekonomi mereka yang relatif rendah disertai rendahnya motivasi meraih pendidikan tinggi, sehingga belum semua masyarakat Cina melihat arti penting pendidikan formal bagi anak-anak mereka. Ada pula aspek psikologis yang turut melemahkan mereka mengejar pendidikan formal, yaitu pendidikan formal untuk anak-anak mereka berbeda dengan pendidikan yang dikelola oleh sesama.

Kehadiran lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat Cina sebenarnya kurang menguntungkan bagi terwujudnya proses asimiliasi menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Sehubungan dengan itu, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, ditetapkan bahwa sekolah asing yang dikelola oleh masyarakat Cina harus ditutup. Larangan itu didasarkan pertimbangan bahwa eksklusivisme dan kuatnya orientasi terhadap negeri leluhur secara langsung maupun tidak langsung mereka peroleh dari lembaga pendidikan. Sistem pengajaran dan materi kurikulum yang berorientasi kepada negeri leluhur merupakan penghambat dalam rangka pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi orang Cina. Begitu halnya dengan yayasan Bhakti suci sebenarnya mempunyai sekolah yang sekarang adalah SMP Negeri 19 Singkawang berada di Jalan Kepol Mahmud tepat di samping Yayasan Bhakti Suci Pemakaman. Namun, pada masa Orde Baru

sekolah milik Tionghoa itu diambil alih oleh pemerintah karena di anggap sekolah asing.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1974 dilakukan pembenahan di berbagai tingkat pendidikan di Singkawang dan sekitarnya. Pembenahan yang terasa mendesak adalah berkaitan dengan penataan kembali pertimbangan antara murid-murid bumiputra dan non-bumiputra . Dalam Bab VI, Pasal 13 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 015 Tahun 1968 disebutkan: “ Jumlah murid WNI harus sekurang-kurangnya 60% dari jumlah murid Sekolah Nasional tersebut.” Penerapan pasal tersebut menghadapi kesulitan karena hanya berdasarkan pada kriteria status kewarganegaraan semata. Untuk mengatasi soal ini, pihak yang berwenang di Singkawang mengambil kebijakan bahwa pertimbangan juga didasarkan atas klasifikasi bumiputra dan non-bumiputra. Jika tidak, maka “sesuatu yang menjiwai” ketentuan tersebut tidak dapat terwujud.

Sejak lama masyarakat Cina di Singkawang memiliki kebiasaan memasukkan anaknya ke sekolah tertentu. Demikian pula halnya masyarakat bumiputera. Orang cina lebih senang memilih sekolah yang dikelola oleh Missi dari agama Katolik atau Zending Kristen Protestan. Kedua jenis sekolah tersebut amat diminati dikeluarga Cina bukah hanya karna mutunya, tetapi juga di sekolah itu banyak anak-anak sesama in grup. Jika anak-anak mereka itu tidak diterima disana karna berbagai alasan, mereka cenderung memilih suatu sekolah yang sebagai besar murid-muridnya anak anak Cina. Tentu terdapat mungkin sekolah tersebut tidak terlampau jauh dari rumah mereka.

Anak-anak dan orang tua murid bumiputra juga memiliki pertimbangan yang sama. Sekolah yang dikelola Missi, ditingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), misalnya SMA Ignasius Singkawang, tidak selalu dinilai baik mutunya oleh kalangan bumiputra. Anak-anak bumiputra lebih suka diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri daripada terpaksa diterima disekolah lainnya. Soal ini terkait erat dengan latar belakang agama Islam yang sebagian

besar di peluk warga bumiputra. Sebaliknya, anak-anak Cina memilih SMA Ignasius sebagai pilihan utama mereka.

Hambatan yang bersifat budaya dan psikologis pada anak-anak Cina menyebabkan mereka menghindari sekolah negeri baik tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), maupun di tingkat SLTA. Pergaulan di sekolah negeri di nilai kurang menyenangkan atau merugikan mereka. Disamping itu, orang tua mereka tampaknya khawatir terhadap akibat yang mungkin timbul, terutama berkaitan dengan proses pembentukan perilaku mereka yang dinilai bertentangan dengan warisan leluhurnya. Para orang tua dan anak-anak itu juga khawatir terhadap konflik atau perbedaan pandangan yang mungkin terjadi. Mereka menyadari benar, jika konflik terjadi, merekalah yang akan merasakan akibat kurang menguntungkan. Lantaran mereka orang Cina.

Penataan kembali perimbangan jumlah murid bumiputra dan non bumiputra, dilaksanakan secara serentak disemua sekolah, mulai SD hingga SLTA. Rasa tidak puas sering muncul karena peraturan ini. Seorang murid yang terkena peraturan tersebut terpaksa harus pindah ke sekolah lain, kadang-kadang malah memilih penyelesaian ekstrim lebih baik tidak sekolah. Murid-murid SD biasanya memilih terpaksa tidak sekolah karena letak sekolah yang ditunjuk sebagai pengganti, jaraknya relatif jauh dari rumah mereka. Jika masalah ini tidak dicarikan jalan keluar yang bijaksana, jelas akan merugikan semua pihak disisi lain, kepala sekolah pun tertimpa masalah . Sebab, jika peraturan itu dilaksanakan sebaik-baiknya, ia akan ditegur atasannya. Dilema yang sering dihadapi sekolah adalah jumlah murid yang harus dipindahkan kadang cukup banyak. Seandainya murid yang mesti dipindahkan beberapa orang, kepala sekolah dapat berkonsultasi dengan atasan mereka kemudian memberikan pengecualian yang masuk akal, misalnya jarak rumah murid ke sekolah cukup jauh.

Lantaran kesulitan tersebut, pada tabel lampiran tampak sejumlah SD yang berasal melaksanakan peraturan tersebut dan tampak pula yang kurang berhasil. SD Negeri No.9, SD Bruderan dan SD Susteran merupakan contoh

sekolah yang berhasil menerapkan pertimbangan. Sebaliknya, SD Negeri No.2 adalah contoh yang kurang berhasil. Sekalipun demikian terlihat perkembangan bahwa semakin lama penyeimbangan itu, berlangsung dengan baik.

Pada 1974, rasio murid bumiputra dengan non bumiputra di SD Negeri No:2 menunjukkan 9:1. Tahun berikutnya (1975) keadaannya jauh lebih buruk, yaitu 11:1. Tetapi pada 1976-1977 perimbangan murid bumiputra dan nonbumiputra dan sekolah itu membaik, yaitu 3:1. Sementara perimbangan yang dituntut peraturan adalah 3 (bumiputra) berbanding 2 (non-bumiputra). Usaha perimbangan yang baik juga dilaksanakan di SD Negeri No.1. Semula perimbangan di SD tersebut adalah 64:1. Setelah melalui perjuangan yang gigih, secara drastis berhasil merubah perimbangan menjadi 1:1: dan pada tahun 1976 menjadi 3:1. Akhirnya pada tahun 1977 keadaannya pulih seperti 2 tahun sebelumnya (1975), yakni 1:1.

Memang, seperti ditunjukkan pada tabel di lampiran, sampai 1977 upaya perimbangan secara menyeluruh belum berhasil. Ini terlihat pada SD yang dikelola Missi (SD St. Francisca dan SD St. Joseph) dan didua SD yang dikelola Zending (SD Cahaya Kebenaran dan SD Torsina 3). Hingga 1977 masih ada beberapa SD yang mempunyai murid bumiputra jauh lebih banyak dibandingkan dengan murid bumiputra, misalnya di SD Negeri No.10 (24:1) dan SD No.4 (7:1). Ada juga sejumlah SD yang dari tahun ke tahun tidak berhasil melakukan penyeimbangan karena dilokasi tersebut tidak terdapat orang Cina, misalnya tampak di SD Swasta Nyarungkop dan SD Swasta Sagatani. Sebaliknya, di SD Swasta Kaliasin dan SD Swasta Padang Pasir tidak terdapat penduduk bumiputa karna kedua SD tersebut terletak di lokasi penampungan para pengungsi Cina.

Mencermati munculnya berbagai kesulitan penerapan kebijakan penyeimbangan itu maka Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Singkawang mengeluarkan kebijakan khusus, yaitu system rayonisasi. Disusul dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan status kewarganegaraan anak didik. Anak-anak Cina yang berstatus WNA, tidak diperkenankan memasuki

sekolah swasta murni maupun swasta yang bersubsidi. Mereka juga diwajibkan memasuki SD yang paling terdekat dengan tempat tinggalnya. Namun kewajiban yang terakhir ini seringkali mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Para orang tua murid masih berpendapat bahwa SD tertentu dinilai favorit, contohnya SD St. Joseph dan Cahaya Kebenaran yang terletak di Kampung Pasiran dan Condong. Di dua kampung tersebut banyak bermukim masyarakat Cina. Tidak sedikit orang tua murid berharap anak-anak mereka dapat diterima di salah satu sekolah ‘favorit’ tersebut. Kecenderungan memasukkan anak-anak mereka ke sana didorong tiga alasan utama yakni, kedua SD tersebut dikelola lembaga keagamaan dari agama yang mereka peluk, SD itu tidak jauh dari tempat tinggal mereka, dan banyak pengajarnya dari kalangan Cina, terutama SD Cahaya Kebenaran. Kedua SD tersebut memang berlokasi di halaman gereja SD St. Josep di halaman Gereja Katolik dan SD Cahaya Kebenaran di halaman Gereja Kristen Protestan.

Mengingat berbagai kesulitan yang muncul dalam pelaksanaan perimbangan murid bumiputra dan non bumi putra, ada cara lain yang ditempuh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka membenahi tenaga pengajarnya. Di SD yang sebagian besar murid-muridnya adalah dari kalangan non-bumiputra, guru yang mengajar di kelas I, II dan III diwajibkan WNI bumiputra. Di sekolah itu kepala sekolahnya juga harus WNI bumiputra. Ketentuan ini lebih mudah dilaksanakan karena merupakan kewajiban bagi para guru sebagai pegawai negeri. Selain itu, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan formal, sekolah harus mematuhi ketentuan yang digariskan pemerintah, terutama guna membentuk manusia Indonesia seutuhnya. (Poerwanto, 2014)